

## **Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2020**

**Winanda Chyntia Simamora\*, Gideon Setyo Budiwitjaksono**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

\*Correspondence email: [winandasimamora4@gmail.com](mailto:winandasimamora4@gmail.com)

**Abstrak.** Kegiatan meneliti ini mempunyai tujuan supaya memahami adanya pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penggunaan sampel dalam kegiatan meneliti ini mempergunakan *purposive sampling* yakni kabupaten/kotapada provinsi sumatera utara yang pernah memiliki kinerja keuangan yang baik minimal 1 kali berdasarkan rasio efisiensi (dengan persentase <100%) selama tahun 2018-2020. Hasil dari penelitiannya menandakan yaitu terdapat pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal kepada kinerja finansial Pemda sedangkan dana alokasi umum tidak memberi pengaruhnya kepada kinerja keuangan pemerintah daerah.

**Kata kunci:** Belanja modal; DAU ;Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah; PAD

**Abstract.** *This study aims to determine the effect of local revenue, general allocation funds, and capital expenditures on the financial performance of local governments. This research is a quantitative research. The sample used in this study uses purposive sampling, namely districts/cities in the provinc of North Sumatra that have had good financial performance at least 1 time based on the efficiency ratio (with a percentage of <100%) during 2018-2020. The results of the study indicate that there is an effect of regional original income and capital expenditure on the financial performance of local governments while general allocation funds have no effect on the financial performance of local governments.*

**Keywords:** *Capital expenditure; DAU; Local Government Financial Performance; PAD*

### **PENDAHULUAN**

Sumatera Utara yakni salah satu wilayah di Indonesia yang telah menerapkan kebijakan otonomi daerah. Otonomi daerah ini diawali dengan penyerahan wewenang atau tanggungjawab yang bersumber dari pemerintahan pusat terhadap pemerintahan daerah yang bersangkutan. Kebijakan otonomi daerah ini dilaksanakan dengan disahkannya UU No.22 Tahun 1999 (lalu diganti menjadi UU No.32 Tahun 2004 dan kemudian UU Nomor 23 Tahun 2014) mengenai pemerintahan daerah serta UU No. 25 Th. 1999 (lalu jadi UU No. 33 Tahun 2004) mengenai perimbangan keuangan diantara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat dan daerah memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan pelayanan publik yang sebelumnya tertinggal. Otonomi daerah memungkinkan pemerintah daerah untuk memajukan daerahnya dan mengantarkan masyarakat menuju keberhasilan atau dapat mensejahterahkan masyarakat melalui potensi dan kemampuan yang ada di masing-masing daerah. Karakteristik utamanya suatu daerah sebagai daerah otonom yakni keterampilan finansial daerah tersebut, yang dimana daerah otonom daerah otonom membutuhkan kekuatan dan kemampuan untuk mengeksplorasi sumber daya keuangan mereka sendiri (Jauhar, 2016).

Oleh karena itu, jika pengelolaan finansial daerah dilaksanakan secara baik serta optimal sejalan terhadap aturan yang diberlakukan, tentu akan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah itu sendiri. Kinerja dapat diartikan sebagai penjelasan tentang pencapaian suatu pelaksanaan/program, serta kebijakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan, sasaran, visi, dan misi dalam organisasi. Kinerja keuangan pemerintah daerah berarti suatu pedoman ataupun indikator yang bisa dipakai suatu daerah dalam menentukan apakah suatu daerah dapat melakukan pengelolaan keuangan dengan baik dan benar. Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk menganalisis kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah adalah penggunaan analisis rasio keuangan APBD, yang ditetaskan dan dilaksanakan dengan menggunakan rasio efisiensi keuangan pemerintah daerah (Wiguna, 2015). Menurut Ofasari (2018), kinerja keuangan dikatakan efisien apabila diperoleh nilai kurang dari 100% ,efisiensi berimbang berada pada persentase 100% dan apabila lebih dari 100% dikatakan tidak efisien.

Kinerja keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara masih jauh dari kata efisien, dilihat dari masih banyak Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Utara yang kinerja keuangannya

memiliki nilai rasio yang lebih dari 100 %. Pada tahun 2018 hanya 12 daerah dari total keseluruhan 33 daerah yang memiliki kinerja keuangan yang dapat dikatakan efisien, begitu juga pada tahun 2019 hanya 19 daerah saja yang kinerja keuangannya efisien bahkan pada tahun 2020 memiliki penurunan yang sangat signifikan dimana hanya 11 daerah saja yang kinerja keuangannya efisien, disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang terjadi suatu kebijakan pembatasan segala kegiatan. Oleh karena itu, tingkat biaya operasional lebih tinggi dari pada realisasi pendapatan sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah masih belum dapat mengelola keuangan daerah secara efisien dan optimal. Melansir berita dari medianbisnisdaily.com (24/06/2021) menyatakan bahwa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Sumut 2020 mendapat kritikan keras dari Fraksi PDIP Sumut. Mereka merasa kinerja keuangan pemprov sumut pada 2020 mengecewakan. Penggunaan anggaran yang digunakan untuk membiayai 8 kegiatan untuk penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp 70 miliar tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan hasil survei BPK RI baru-baru ini. Sementara itu, tingkat pencapaian dana untuk hasil perpajakan sekadar 81,28% dan lain-lain pendapatan yang sah hanyalah 65,23%. Kemerosotan perekonomian pada Sumut yang kala itu terdapat kontraksi 1,07% dan juga banyak terlebih lagi banyak pejabat yang mempunyai status plt yang berdasarkan fraksi ini menciptakan kinerja kurang optimal.

Suatu faktor yang bisa mempengaruhi kinerja keuangan Pemda adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) . PAD bisa dijadikan menjadi indikator untuk menilai tingkat kinerja dan kemandirian suatu wilayah pada saat pengelolaan keuangan daerah tersebut. Semakin tinggi pendapatan suatu daerah maka akan semakin besar peluang untuk membangun perekonomian daerah dan mensejahterahkan masyarakat (Mamuka, Rorong, & Sumual, 2019). Selain PAD, salah satu yang dapat dijadikan pemerintah menjadi infrastruktur untuk peningkatan perekonomian suatu daerah adalah penggunaan pendapatan daerah yang berasal dari Dana Alokasi Umum. Dana Alokasi Umum sebagai dana yang bertujuan guna pemeratakan finansial atau keuangan antardaerah dan digunakan dalam mendanai keperluan pembelanjaan pemerintah daerah yang terkait dengan pelaksanaan desentralisasi. Pendanaan tersebut berasal melalui penerimaan APBN yang bertujuan untuk menciptakan pemerataan finansial antardaerah terkait dengan pelaksanaan desentralisasi dan alokasi dana untuk kebutuhan daerah (Sari & Halmawati, 2021). PP No. 71 Tahun 2010 mengungkapkan bahwa belanja modal adalah belanja yang kegunaannya melebihi 1 tahun anggaran yang ditentukan serta juga untuk membantu untuk meningkatkan aset daerah itu ataupun kekayaan yang lalu akan memberi peningkatan belanja rutin. Misalnya, sebagai beban pemeliharaan dalam kelompok belanja administrasi umum. Aset tetap pemerintah daerah yang dihasilkan dari belanja modal adalah infrastruktur, peralatan, dan harta berwujud lainnya. Pengelolaan belanja yang baik membuat *value for money* yang baik dan memungkinkan evaluasi yang lebih baik terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah baik (Nauw & Riharjo, 2021). Riset ini dilaksanakan supaya melaksanakan uji beserta analisis pengaruhnya PAD kepada Kinerja Keuangan Pemda Kabupaten/Kota di Prov. Sumatera Utara, untuk menguji dan menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum ( DAU) terhadap terhadap Kinerja Keuangan Pemda Kabupaten/Kota di Prov. Sumatera Utara dan guna menguji dan menganalisis pengaruhnya Belanja Modal kepada Kinerja Keuangan Pemda Kabupaten/Kota di Prov. Sumatera Utara.

## **METODE**

Objek penelitian ini adalah APBD dan Laporan rincian DAU yang memiliki kaitan dengan kinerja keuangan, PAD, belanja modal, dana alokasi umum dalam Pemda kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2018-2020. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan jenis penelitian yang menciptakan temuan-temuan baru yang dapat diperoleh dengan menggunakan metode statistik atau instrumen kuantifikasi/pengukuran lainnya (Jaya, 2020). Data keseluruhan yang dipakai bagi kegiatan meneliti ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari situs web DJPK Kemenkeu. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling* yaitu kabupaten/kota yang pernah memiliki kinerja keuangan yang baik minimal 1 kali berdasarkan rasio efisiensi (dengan persentase <100%) selama tahun 2018-2020. Berdasarkan metode mengambil sampel, sehingga yang terpenuhi kriteria didapat sejumlah 28 Kabupaten/Kota sampel, sehingga dalam kurun waktu 3 tahun penelitian diperoleh 84 observasi dan dijadikan merupakan sampel pada penelitiannya ini. Metode menganalisis data yang dipakai di kegiatan meneliti ini yaitu statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, uji F (simultan), uji t (parsial) dan uji koefisien determinasi.

## HASIL

**Tabel 1**  
**Hasil Uji Normalitas**

		Unstandardized Residual
N		84
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0E-7
	Std. Deviation	4.05491503
	Absolute	.057
Most Extreme Differences	Positive	.057
	Negative	-.055
Kolmogorov-Smirnov Z		.524
Asymp. Sig. (2-tailed)		.947

Sumber : data olahan

Tabel 1 uji *one-sample komogrov-smirnov test* dapat dikatakan bahwa nilai signifikan sebesar 0,947 lebih dari 0,05 dan sesuai dengan analisis yang digunakan, maka hal ini bermakna yakni data itu berdistribusikan normal. Sedangkan Tabel 2 diketahui bahwa variabel pendapatan asli daerah memiliki nilai signifikansi sebesar 0,242 > 0,05; variabel dana alokasi umum memiliki nilai signifikansi sebesar 0,671 > 0,05; dan dana alokasi umum memiliki nilai signifikansi sebesar 0,828 > 0,05. Maka, dapat dikatakan bahwa seluruh variabel independen dalam penelitian ini tidak terjadi masalah heteroskedastisitas dalam model regresi.

**Tabel 2**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

		Unstandardized Residual
PAD	Correlation Coefficient	.129**
	Sig. (2-tailed)	.242
	N	84
DAU	Correlation Coefficient	.047
	Sig. (2-tailed)	.671
	N	84
Spearman's rho	Belanja Modal	.024**
	Sig. (2-tailed)	.828
	N	84
Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	1.000
	Sig. (2-tailed)	.
	N	84

Sumber : data olahan

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Multikolinieritas**

		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
	(Constant)		
1	PAD	.312	3.201
	DAU	.373	2.681
	Belanja Modal	.435	2.301

Sumber : data olahan

Tabel 3 dapat dilihat bahwa nilai *tolerance* dari masing-masing variabel bebas lebih 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10 maka bisa berkesimpulan yakni seluruh variabel bebasnya dalam penelitian ini tidak terjadi gejala multikolinieritas. Sedangkan Tabel 4 dapat dipahami yakni besaran nilai Durbin Watson (DW – Test ) yaitu sebesar 1,304 dengan jumlah variabel sebanyak 3 dan n sebanyak 84. Model yang tidak memiliki autokorelasi jika nilai DW antara -2 dan 2, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi autokorelasi. Mengacu pada Tabel 4 besarnya nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sejumlah 0,210, artinya 21%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel-

variabel independen yang terdapat dalam penelitian ini hanya bisa menjelaskan kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 21% , sedangkan sisanya 79% dipengaruhi faktor lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Autokorelasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.459 <sup>a</sup>	.210	.181	4.13024	1.304

Sumber : data olahan

**Tabel 5**  
**Hasil Analisis Regresi Linear Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	99.511	1.326		75.040	.000
1 PAD	-5.307E-012	.000	-.372	-2.090	.040
DAU	-4.457E-012	.000	-.320	-1.966	.053
Belanja Modal	1.808E-011	.000	.640	4.247	.000

Sumber : data diolah

Tabel 5 diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :  $Y = 99,511 - 5,207 X_1 - 4,457 X_2 + 1,808 X_3 + e$

Berdasarkan persamaan diatas, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

1. Nilai konstanta sebesar 99,511 menunjukkan yakni variabel bebas/independen yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal konstan, maka besar variabel terikat yaitu Kinerja Keuangan bernilai positif 99,511.
2. Nilai koefisien regresi Pendapatan Asli Daerah yakni sebesar -5,207. Hal ini menandakan bila variabel PAD ada peningkatan satu satuan berarti Kinerja Keuangan bisa mengalami penurunan sejumlah 5,207 yang berasumsi variabel bebas adalah konstan atau bernilai nol (0).
3. Nilai koefisien regresi Dana Alokasi Umum yakni sebesar -4,457. Hal itu meanandakan bila variabel DAU ada peningkatan satu satuan berarti Kinerja Keuangan bisa mengalami penurunan sejumlah 4,457 yang berasumsi variabel bebas adalah konstan atau bernilai nol (0).
4. Nilai koefisien regresi Belanja Modal yakni sebesar 1,808. Hal itu meanandakan bila variabel Belanja Modal ada peningkatan satu satuan berarti Kinerja Keuangan bisa mengalami peningkatan sejumlah 1,808 yang berasumsi variabel bebas adalah konstan atau bernilai nol (0).

Berdasarkan Tabel 5 nilai signifikansi Pendapatan Asli Daerah adalah 0,040 yang berarti kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel PAD memberi pengaruhnya kepada Kinerja Keuangan Pemda, nilai signifikansi Dana Alokasi Umum adalah 0,053 yang berarti lebih dari 0,05 sehingga dapat berkesimpulan yakni variabel Dana Alokasi Umum tidak memberi pengaruhnya kepada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, nilai signifikansi Belanja Modal adalah 0,000 yang berarti kurang dari 0,05 maka berkesimpulan bahwasanya variabel Belanja Modal memberi pengaruhnya kepada Kinerja Keuangan Pemda. Tabel 6 menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ , sehingga berkesimpulan yakni dengan bersimultan variabel bebas (PAD,DAU, Belanja Modal) memberi pengaruhnya kepada terhadap variabel dependen (Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah).

**Tabel 6**  
**Hasil Uji F**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	363.608	3	121.203	7.105	.000 <sup>b</sup>
Residual	1364.714	80	17.059		
Total	1728.321	83			

Sumber : data olahan

Riset ini menandakan yakni PAD memberi pengaruhnya kepada kinerja keuangan Pemda. PAD memberi makna penting untuk daerah dikarenakan nanti bisa digunakan dalam mengarahkan operasional pemerintah untuk mendukung kemakmuran masyarakat daerah tersebut. Semakin tinggi penerimaan PAD, semakin tinggi pula sumber

pendanaannya. Jika sumber pendanaan dapat dimanfaatkan dengan optimal maka akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang semakin baik (Sari & Mustanda, 2019). Hasil riset ini selaras dengan penelitian Saraswati & Rioni (2019) dan Sari & Mustanda (2019) yang menandakan yaitu PAD memberi pengaruhnya kepada kinerja keuangan Pemda. Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Machmud & Radjak (2018), yang mengungkapkan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini menunjukkan bahwa dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Adanya dana alokasi umum membuat pemerintah daerah semakin bergantung pada pemerintah pusat dan semakin besar transfer DAU yang diterima maka yang berdampak kepada kinerja keuangan pemerintah daerah yang kurang baik (Harjito, Nugraha, & Yulianto, 2020). Penelitian ini selaras dengan penelitian Machmud & Radja (2018) dan Harjito, Nugraha, & Yulianto (2020) yang mengungkapkan bahwa Dana Alokasi Umum tidak memberi pengaruh kepada kinerja keuangan Pemda. Namun bertolak belakang dengan penelitian Sari & Halmawati (2021) yang menyampaikan yakni dana alokasi umum mempunyai pengaruhnya signifikan dan positif kepada kinerja keuangan Pemda. Penelitian ini menandakan yaitu belanja modal membawa pengaruh kepada kinerja keuangan Pemda. Pengalokasian Belanja modal yang tepat akan mengarah pada penciptaan infrastruktur dan fasilitas yang lebih baik dan relevan yang nantinya akan meningkatkan efisiensi diberbagai sektor dan produktivitas masyarakat yang menimbulkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Apabila pembangunan yang dikerjakan oleh pemerintah semakin banyak maka berdampak pada peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah. Apabila pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah semakin banyak maka akan memberikan dampak pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang nantinya akan menghasilkan kinerja pemerintah daerah yang lebih baik (Astuti & Mimba, 2016). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sari & Mustanda (2019), Sri Mulyani, Hardiyanto Wibowo (2017), Astuti & Mimba (2016) yang mengungkapkan bahwa belanja modal memiliki berpengaruh yang positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dan juga penelitian yang dilakukan oleh Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Thalib (2019) yang mengungkapkan bahwa Belanja Modal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

## **SIMPULAN**

Penelitian ini mengungkapkan bahwa PAD memberi pengaruhnya kepada kinerja keuangan Pemda, dana alokasi umum tidak memberi pengaruhnya kepada kinerja keuangan pemerintah daerah dan belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Keseluruhan variabel independen dengan bersama-sama (simultan) memberikan pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai variabel independen.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Astuti, N. D., & Mimba, S. N. 2016. Pengaruh Belanja Rutin dan Belanja Modal Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 1924-1950.
- Harjito, Y., Nugraha, G. S., & Yulianto. 2020. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomi FEB.UN PGRI Kediri*, 19-28.
- Jauhar, F. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kab/Kota Se Sumatera barat. *Jurnal Akuntansi*.
- Jaya, I. L. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.
- Machmud, J., & Radjak, L. I. 2018. Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo. *Journal Of Accounting Science*, 17-32.
- Mamuka, K. K., Rorong, I. P., & Sumual, J. 2019. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 119-128.
- Medanbisnisdaily. 2021. Retrieved from <https://medanbisnisdaily.com/>  
[https://medanbisnisdaily.com/news/online/read/2021/06/24/137897/pdip\\_sumut\\_sebut\\_kinerja\\_keuangan\\_pe\\_mprov\\_sumut\\_2020\\_bobrok](https://medanbisnisdaily.com/news/online/read/2021/06/24/137897/pdip_sumut_sebut_kinerja_keuangan_pe_mprov_sumut_2020_bobrok)
- Mulyani, S., & Wibowo, H. 2017. Pengaruh Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, Intergovernmental Revenue dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan ( Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2015). *Kompartemen : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 57-66.
- Nauw, E. T., & Riharjo, I. B. 2021. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*.
- Ofasari, D. 2018. Analisis Laporan Keuangan Dalam Mengukur Kinerja Keuangan RSUD Sekayu Kabupaten Banyuwangi Dengan Menggunakan Metode Valur For Money. *Jurnal ACSY Politeknik Sekayu*, 57-66.
- Pemerintah Daerah Di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen* , 2834-2861.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Pemerintah Daerah.

Saraswati, D., & Rioni, Y. S. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 110-120.

Sari, B. I., & Halmawati. 2021. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. *JEA : Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1-11.

Sari, N. D., & Mustanda, I. 2019. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Manajemen* , 1080-1110.

Thalib, F. 2019. Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Di Jawa Timur Periode 2013-2017. *eprints perbanas*.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah..

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.

Wiguna, K. Y. 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana alokasi Umum, dan Belanja Modal Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Suamtera Selatan. *Jurnal Fordema*.